

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bryan A. Garner dan Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, (St. Paul, Minn: West Group, 1999)

H.M.N. Puwosutjipto, Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1978).

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Dagang, (Jakarta: Intermasa, 1995).

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Rudy A. Lontoh, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung: Alumni, 2001).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981).

Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993).

Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006).

Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011).

Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU), (Jakarta: Kencana, 2016).

Trisadini Prasatinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan, (Surabaya: Revka Petra Media, 2013).

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986).

R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).

Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2010).

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1996).

## **B. Peraturan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN. Smg. jo Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN. Smg.

### C. Jurnal

Fennieka Kristianto, “Dampak Kepailitan Pengembang Rumah Susun Terhadap Transaksi Jual Beli Rusun (Studi Kasus Rusunami Kemanggisan Residence)”, Jurnal Problematika Hukum Vol. 1, Nomor 2(1) – 2016, halaman 1-19.

Hidayatul Ainy, dkk., “Hubungan Antara Fertilitas Mortalitas dan Migrasi dengan Laju Pertumbuhan Penduduk”, Preventia: The Indonesian Journal of Public Health Vol. 4, Nomor 1 – 2019, halaman 2-9.

Mika Anabelle dan Hanafi Tanawijaya, “Sistem Pre Project Selling Dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen Menurut Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat Nomor: <sup>1</sup>616/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 20/PDT.G/2019/PT.DKI”, Jurnal Hukum Adigama Vol. 2, Nomor 2 – Desember 2019, halaman 1-25.

R. Suharto, dkk., “Kepemilikan Rumah Susun Di Indonesia”, Law, Development & Justice Review Vol. 2, Mei 2019, halaman 23-32.

Teddy Francis dan Ariawan Gunadi, “Akibat Hukum Bagi Pemilik Satuan Rumah Susun Terhadap Developer Rumah Susun yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga”, Jurnal Hukum Adigama Vol. 3, Nomor 2 – Desember 2020, halaman 1260-1283.

Vinna Khairunnisa, “Tanggung Jawab Pengembang (*developer*) dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen Meikarta Secara *Pre Project*

*Selling*”, Universitas Islam Indonesia, Maret – 2018, halaman 1-142.

Vivi Evasari Tjokro, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Apartemen (Satuan Rumah Susun)”, Universitas Narotama, 2016.

Sunarmi, “Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)”, Universitas Sumatera Utara, 2004, halaman 1-29.

Juditia Damlah, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, Lex Crimen Vol. VI, Nomor 2 – 2017, halaman 91-98.

Assalmani, M. Ngamirul Bustanil Asyhar dan Priyono, Djoko, “Konsep Pengaturan Cross-Border Insolvency Badan Usaha di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) Dalam Rangka Mewujudkan *ASEAN Economic Integration*”, Eprints Undip, 2018, halaman 1-115.

Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran Hadist) Secara Tidak Tunai, Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Edisi 9 – Mei 2019, halaman 16-35.

Galuh Hapsari, “Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Hal Terjadi Sengketa”, Universitas Islam Indonesia, 2018, halaman 1-104.

Sherly Angelina Chandra dan Ariawan Gunadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Yang Perusahaan Pengembangnya Dinyatakan Pailit (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Nomor 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”, Universitas Tarumanegara, 2021, halaman 1-22.

Christine Nhazzai Agustine, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU (Analisis Putusan No.62/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby)”, Universitas Pamulang, 2021, halaman 123-127.

#### **D. Internet**

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 12.45 WIB.

Eka Kurniawan Putra, “Penegakan Hukum Pada Bisnis Properti dengan Pola *Pre Project Selling*.” Diakses dari <https://mkn.fh.unair.ac.id/penegakan-hukum-pada-bisnis-properti-dengan-pola-pre-project-selling/?lang=id> pada 29 Oktober 2021 pukul 16.23 WIB.

Aletheia Rabbani, “Pengertian Penyajian Data, Tujuan, Fungsi, dan Caranya.” Diakses dari <https://www.sosial79.com/2020/12/pengertian-penyajian-data-tujuan-fungsi.html> pada 25 November 2021 pukul 11.54 WIB.

<https://lbh-ri.com/hak-konsumen-pada-produk-cacat/> diakses pada 21 Mei 2022 Pukul 19.34 WIB.

<https://www.ehukum.com/2019/07/cara-mudah-balik-nama-shm-sarusun.html> diakses pada 22 Mei 2022 Pukul 16.29 WIB.